

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROBABILITAS PELAKSANAAN HAK POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI (PENDEKATAN REGRESI LOGIT)

Irzal Anderson¹, dan Kuswanto²

¹Program Studi PPKn Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

²FKIP Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

E-mail: kuswanto.fkip@unja.ac.id

ABSTRAK. Penelitian bertujuan untuk mengetahui probabilitas masyarakat Kota Jambi dalam melaksanakan hak politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode *Ex-Post Facto* untuk mengetahui peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di Kota Jambi yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan yang berjumlah 865. Sampel dipilih menggunakan teknik area sampling tingginya tingkat abstain di suatu daerah sebanyak 266 responden. Data diperoleh menggunakan angket dan dianalisis dengan menggunakan model regresi logit. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat probabilitas pelaksanaan hak politik masyarakat di Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019 dipengaruhi secara signifikan oleh faktor pendidikan politik, budaya politik, sikap politik dan tingkat pendapatan. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan kondisi sosial politik serta jenis pekerjaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat probabilitas pelaksanaan hak politik masyarakat di Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Diperlukan optimalisasi peran pemerintah dan pelaku politik untuk melakukan sosialisasi politik di masyarakat dan konsistensi kinerja pemerintah dengan visi dan misi yang telah dikampanyekan agar mengurangi abstain masyarakat dalam Pemilu Presiden.

Kata Kunci: Analisis Faktor; Probabilitas Pelaksanaan Hak Politik; Pemilihan Umum Presiden; Regresi Logit

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE PROBABILITY OF THE IMPLEMENTATION OF POLITICAL RIGHTS IN THE GENERAL ELECTION OF THE 2019 PRESIDENT IN JAMBI CITY (LOGIT REGRESSION APPROACH)

ABSTRACT. This study aims to determine the probability of the Koa Jambi community exercising political rights in the 2019 Presidential Election. This study uses the *Ex-Post Facto* method to determine the events that occur as a result of the factors that influence it. The population in this study were people who were registered as voters in the 2019 Presidential Election in Jambi City which consisted of 11 Districts and 62 Kelurahan, totaling 865. The sample was selected using a sampling area technique with a high rate of abstention in an area of 266 respondents. The data were obtained using a questionnaire and analyzed using a logit regression model. The results of the study explained that the probability level of exercising people's political rights in Jambi City in the 2019 presidential election was significantly influenced by factors of political education, political culture, political attitudes and income levels. Public perceptions of government performance, and socio-political conditions and types of work do not significantly influence the probability level of the implementation of community political rights in Jambi City during the 2019 Presidential Election. Optimization of the role of government and political actors is needed to conduct political outreach in society and consistency of performance. government with a vision and mission that has been campaigned to reduce public abstention in the Presidential General Election.

Keywords: Faktor Analysis; Probability of the Exercise of Political Rights; Presidential Election; Logit Regression

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depan. Pemilu dilaksanakan dalam rangka untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, melaksanakan kedaulatan rakyat serta perwujudan dari hak-hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden secara langsung dan serentak di seluruh Indonesia memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik sehingga mereka dapat menentukan pemimpinnya sebagai pembuat kebijakan secara umum bagi masyarakat (Nugraha, 2017).

Keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu Presiden secara langsung pada Tahun 2019 merupakan kedua kalinya dilaksanakan. Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 terdapat kecenderungan sebagian masyarakat Provinsi Jambi tidak melaksanakan hak politiknya (abstain), yaitu mencapai 14,72 persen (KPU RI, 2020). Meskipun tingkat golput di Provinsi Jambi di bawah rata-rata nasional (18,03%), namun tingkat sebaran golput di beberapa Kabupaten/Kota di atas rata-rata Nasional, seperti Kota Jambi mencapai 19,61 persen, tertinggi ke dua setelah kabupaten Kerinci yang mencapai 22,40 persen. Tingginya tingkat abstain masyarakat Kota Jambi mencerminkan realisasi hak politik masyarakat belum berjalan secara

maksimal dikarenakan sebagian warga kota Jambi lebih suka memilih abstain daripada merealisasikan hak politiknya pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Menurut Surbakti (2013), tindakan atau pilihan seseorang untuk ikut atau tidak ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, sikap dan orientasi individu tersebut yang membuat keputusan.

Kota Jambi merupakan daerah pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan. Sebagian besar masyarakat Kota Jambi bekerja pada sector perdagangan, yaitu sekitar 37,07 persen (BPS Kota Jambi, 2019). Masyarakat yang bekerja pada sector perdagangan pada umumnya lebih mengutamakan kepentingan pekerjaan daripada yang lainnya. Hal yang sama juga terjadi di daerah Samarinda, bahwa masyarakat yang bekerja disektor swasta (perdagangan) lebih mengutamakan pekerjaan dan menganggap lebih penting dari pada berpartisipasi dalam pemilu (Hidayat, 2016).

Bagi masyarakat yang sangat tinggi keterikatannya dengan pekerjaan, cenderung untuk bersikap abstain dalam pelaksanaan hak politik. Menurut Sahid (2015), masyarakat yang berpendidikan tinggi, memiliki penghasilan lebih besar lebih partisipatif dibandingkan dengan mereka yang miskin, tak berpendidikan, dan memiliki pekerjaan berstatus rendah. Masyarakat yang memiliki pekerjaan bersatus rendah merasa sangat sulit untuk meninggalkan pekerjaannya karena akan merasa kehilangan penghasilan apabila tidak bekerja, sehingga cenderung untuk tidak melaksanakan hak politiknya pada saat Pemilu dan memilih untuk bekerja.

Memilih dan dipilih merupakan hak politik setiap masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-undang. Bawamenewi (2019) menegaskan bahwa hak politik merupakan hak setiap masyarakat dijamin berdasarkan hukum dalam meraih, merebut kedudukan, kekuasaan dan kekayaan. Secara hukum, hak politik masyarakat dijamin berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 43: (1) yang menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun memilih merupakan hak asasi setiap warganegara, namun sikap abstain dalam demokrasi mengakibatkan masyarakat bersikap apatis terhadap sistem dan penguasa karena tidak melakukan perubahan mendasar sesuai dengan janji-janji pada saat kampanye. Adanya kebebasan dalam negara demokrasi dimana mereka beranggapan bahwa tidak memilih merupakan suatu kebebasan dianggap tidak

membawa dampak yang signifikan terhadap bangsa. Abstain merupakan bentuk sikap yang kurang bijak sebagai warga negara karena dapat memicu ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Subanda, 2009). Dalam sistem pemilihan langsung, masyarakat bebas melakukan apa yang dikehendakinya. Kondisi ini menjadi masalah bagi masyarakat yang bersikap abstain sebab keberadaannya tidak prosedural dan substansial sehingga menjadi bentuk kegagalan dalam proses demokrasi. Namun perlu disadari bahwa adanya sikap abstain masyarakat dalam Pemilu Presiden menjadi bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berdaulat. Kecenderungan masyarakat dalam melaksanakan hak politiknya ditentukan oleh tingkat kesadaran yang terbentuk berdasarkan tingkat pengetahuan politik, pemahaman politik, sikap politik dan tindakan politik (Hendrik, 2010). Hasil penelitian Widhiasthini et al. (2019) mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, yaitu tidak memiliki kompetensi, geografis dan tidak independen. Secara spesifik, Arianto (2011) dalam penelitiannya mengungkap penyebab masyarakat bersikap abstain dalam pemilu karena disebabkan oleh faktor teknis pemilih sendiri, pekerjaan, faktor administrasi, sosialisasi dan sikap politik.

Sikap masyarakat dalam melaksanakan hak politik merupakan bagian dari hak berdemokrasi yang harus dihormati. Masyarakat Kota Jambi dengan berbagai karakter dan kondisi sosial-budayanya memberikan alasan tersendiri dalam menentukan sikapnya untuk melaksanakan hak politiknya pada Pemilu Presiden. Sikap ini membentuk pola probabilitas yang perlu untuk dikaji. Tingkat probabilitas masyarakat dalam melaksanakan hak politik seperti ini akan sangat efektif dianalisis dengan menggunakan pendekatan logit sehingga menghasilkan informasi tentang kecenderungan masyarakat memilih atau abstain dalam Pemilu. Pendekatan logit merupakan bentuk novelty dalam kajian pelaksanaan hak politik. Dengan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dijadikan dasar kebijakan dalam meningkatkan pelaksanaan hak politik dan mengurangi sikap abstain masyarakat pada Pemilu Presiden.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Ex-Post Facto untuk mengetahui tingkat probabilitas pelaksanaan hak politik masyarakat Kota Jambi

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di Kota Jambi yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan yang berjumlah 865 pemilih. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik area sampling yaitu penentuan daerah penelitian didasarkan pada tingginya tingkat abstain di suatu daerah (Taherdoost, 2016). Secara proporsional, sampel dipilih sebanyak 266 orang.

Data diperoleh dengan menggunakan instrument berupa angket dan dianalisis menggunakan model regresi logistic. Model ini diharapkan mampu menjelaskan tingkat probabilitas pelaksanaan hak politik masyarakat (memilih dan tidak memilih), sehingga menjamin nilainya terletak antara 0 dan 1, dengan demikian respon dari variabel dependen bersifat dikotomi terpenuhi. Uji persyaratan Analisis terdiri dari (1) Asumsi model logit menghendaki error terms tidak berdistribusi normal. Normalitas data akan diuji dengan menggunakan Jarque-Bera (JB) test of normality, (2) Untuk mengetahui tingkat kecocokan model digunakan koefisien determinasi yang dikembangkan oleh Mc-Fadden (R^2 MCF). Nilai R^2 MCF terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Apabila nilai R^2 MCF semakin mendekati nilai 1, maka variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen atau model semakin baik. Model regresi logit dianggap baik apabila memiliki nilai R^2 MCF antara 0,2 hingga 0,4. (3) Dalam model regresi logit, uji signifikansi pengaruh secara parsial variabel independen dengan variabel dependen menggunakan nilai Z statistik atau didasarkan pada nilai probabilitasnya (p-value). (4) Untuk mengetahui tingkat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji statistik likelihood ratio (LR) (Stoltzfus, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui probabilitas pelaksanaan hak politik masyarakat Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Probabilitas pelaksanaan hak politik dikategorikan ke dalam dua bentuk pemenuhan hak politik, yaitu memilih (1) dan tidak memilih (0). Dari 266 responden yang diteliti, terdapat 170 orang atau 63,91 persen yang melaksanakan hak politiknya dan 96 orang atau 36,09 persen tidak melaksanakan hak politiknya, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Dalam penelitian ini, faktor yang diduga mempengaruhi probabilitas pelaksanaan hak politik masyarakat Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun

2019 adalah Pendidikan Politik, Kinerja Pemerintah, Sosialisasi Politik, Budaya Politik, Sikap Politik, Status Ekonomi (Tingkat Pendapatan dan Jenis Pekerjaan). Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi logit. Dengan memasukkan ke tujuh variabel tersebut ke dalam model, diperoleh nilai R-square sebesar 0.711 atau 71.1% (Cox & Snell) dan 0.975 atau 97.5% (Nagekerke). Dengan demikian, ke tujuh variabel independen yang dipilih dapat menjelaskan tingkat pelaksanaan hak politik sebesar 97.5%.

Tabel 1. Pelaksanaan Hak Politik Masyarakat Kota Jambi pada Pemilu Presiden tahun 2019.

Skala	Kategori	F	Prosentase (%)
1	Memilih	170	63.91
0	Tidak Memilih	96	36.09
	Jumlah	266	100

Sumber: data primer diolah

Berdasar hasil uji Hosmmer and Lemeshow Test, diperoleh nilai Chi-square sebesar 10,38 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,24 lebih besar dibandingkan dengan taraf kesalahan (5%) sehingga model yang dihasilkan telah cukup menjelaskan data (*goodness of fit*).

Table2. Variables in the Equation

Variable	B	S.E.	Wald	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a Pdk_P	4.06	2.05	3.93	.04	57.78
K_Pem	.22	1.35	.02	.88	1.23
Sos_P	-1.50	1.74	.75	.38	.22
Bdy_P	5.56	2.59	4.61	.03	259.07
Skp_P	2.44	.96	6.40	.01	11.47
S_Eko1	2.92	1.46	3.98	.04	18.44
S_Eko2	.64	1.13	.32	.57	1.89
Constant	-40.92	12.50	10.71	.00	.00

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil analisis model regresi logistic pada Tabel 2, terdapat beberapa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan hak politik masyarakat Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019, yaitu variabel pendidikan politik, budaya politik, sikap politik dan status ekonomi (tingkat pendapatan), dimana nilai p-value signifikansi variabel tersebut lebih kecil dibandingkan dengan taraf kesalahan sebesar 5 persen. sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan hak politik masyarakat Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019 adalah variabel persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sikap politik, budaya politik dan status ekonomi masyarakat dalam bentuk jenis pendapatan, dimana nilai p-value signifikansi

dari variabel ini lebih besar dibandingkan dengan taraf kesalahan sebesar 5 persen. Secara matematik dijelaskan pada persamaan berikut ini:

$$\text{Logit}\left(\frac{\pi}{1-\pi}\right) = \frac{e^{(-40.92+4.06*Pdk_P+0.21*K_Pem-1.50*Bdy_P+2.44*Skp_P+2.91*S_Eko1+0.64*S_Eko2)}}{1+e^{(-40.92+4.06*Pdk_P+0.21*K_Pem-1.50*Bdy_P+2.44*Skp_P+2.91*S_Eko1+0.64*S_Eko2)}}$$

Persamaan tersebut merupakan bentuk logaritma natural. Penjelasan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan anti log bilangan tersebut. Koefisien exp (B1) menjelaskan bahwa peningkatan Pendidikan Politik sebesar 1 akan ada merubah probabilitas masyarakat untuk melaksanakan hak politik pada Pemilu Presiden Tahun 2019 sebesar 57.78, atau dengan kata lain apabila terjadi peningkatan pendidikan politik masyarakat dari rendah ke tinggi akan meningkatkan probabilitas pelaksanaan hak politik pada Pemilu Presiden sebesar 57.78 kali.

Nilai koefisien exp (B4) menjelaskan bahwa peningkatan Budaya Politik sebesar 1 akan merubah pelaksanaan hak politik (memilih) sebesar 259. Maksudnya adalah, jika terjadi peningkatan Budaya Politik masyarakat dari rendah ke tinggi akan meningkatkan probabilitas pelaksanaan hak politik pada Pemilu Presiden sebesar 259 kali.

Nilai koefisien exp (B5) menjelaskan bahwa peningkatan Sikap Politik sebesar 1 akan merubah pelaksanaan hak politik (memilih) sebesar 11.47. Artinya, jika terjadi peningkatan sikap politik masyarakat dari rendah ke tinggi akan meningkatkan probabilitas pelaksanaan hak politik pada Pemilu Presiden sebesar 11.47 kali.

Nilai koefisien exp (B6) menjelaskan bahwa peningkatan Status Ekonomi berdasarkan Tingkat Pendapatan sebesar 1 akan merubah pelaksanaan hak politik (memilih) sebesar 18.44. Artinya, jika terjadi peningkatan Status Ekonomi berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat dari rendah ke tinggi akan meningkatkan probabilitas pelaksanaan hak politik pada Pemilu Presiden sebesar 18.44 kali.

Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Probabilitas Pelaksanaan Hak politik Masyarakat Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019

Pendidikan politik merupakan upaya menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik serta memiliki sikap positif terhadap pembangunan (Handoyo & Lestari, 2017). Minimnya pemahaman masyarakat mengenai isu-isu politik dan aktivitas politik menyebabkan sikap apatis terhadap pelaksanaan demokrasi dan dinamika politik pemerintahan di sekitarnya (Bashori, 2018). Dengan demikian, tingkat pendidikan politik tidak hanya diukur dari pengetahuan (*bildungwissen*), namun

juga ditentukan oleh tingkah laku (*verhaltenswissen*) dan tindakan (*aktionwissen*).

Berdasarkan data yang diolah dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kecenderungan masyarakat Kota Jambi untuk melaksanakan hak politik pada Pemilu Presiden Tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh pendidikan politik masyarakat. Apabila pendidikan politik masyarakat tinggi, maka probabilitas atau kecenderungan masyarakat dalam pelaksanaan hak politik menjadi tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budianto (2017), dimana tingkat pendidikan politik masyarakat secara signifikan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasuha & Cecep (2019) juga menyebutkan hal yang sama, dimana pendidikan politik berpengaruh positif terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada.

Dalam studi literaturnya. Nurdiansyah (2015) menjelaskan bahwa partisipasi seseorang ditentukan oleh tingkat pengetahuan politiknya. Seseorang yang tingkat pengetahuan politiknya baik, akan lebih aktif dalam berpolitik. Namun untuk menjadikan seseorang melek politik (paham politik) perlu dipadukan antara pengetahuan politik, sikap dan keterampilan dalam berpolitik. Meningkatnya pengetahuan politik masyarakat akan semakin mengoptimalkan partisipasinya dalam sistem politik (Kantaprawira, 2014).

Dalam demokrasi modern, pendidikan politik sangat diperlukan karena tuntutan demokrasi itu sendiri. Demokrasi menciptakan ketidakstabilan yang besar tetapi juga membawa peluang dan harapan baru. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk mengubah pandangan politik terhadap masyarakat tetapi juga untuk mendorong usaha reformasi dan kelembagaan sosial yang dinamis. Pendidikan Politik merupakan rangkaian upaya menerapkan masyarakat adil serta makmur berdasarkan Pancasila yang sebelumnya mengalami gelombang pasang. Pendidikan politik menjadi bagian dari proses reformasi politik Indonesia yang saat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan sistem politik demokratis dinamis dan efektif (Pasaribu, 2017). Kecerdasan masyarakat sangat dituntut agar memberikan hak suaranya yang didasarkan pada keinginan sendiri.

Pengaruh Kinerja Pemerintah terhadap Probabilitas Pelaksanaan Hak Politik Masyarakat Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019

Wujud kinerja pemerintah terlihat dari hasil kegiatan atau program yang hendak/telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang terukur secara kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai pelaksana birokrasi, kinerja pemerintah merupakan

wujud dari pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilaian masyarakat terhadap pemerintah terkait dengan tanggung jawab dan loyalitas, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan (Hendrik, 2010). Penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah membangun sikap loyalitas dan elektabilitas terhadap kepala Negara/ Daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 266 responden, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan hak politik pada Pemilu Presiden di Kota Jambi tidak dipengaruhi oleh kinerja pemerintah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kecenderungan masyarakat dalam melaksanakan hak pilihnya tidak didasarkan pada kinerja pemerintah yang dirasakan dalam pembangunan. Hasil ini menjelaskan bahwa, probabilitas pelaksanaan hak politik pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di Kota Jambi tidak ditentukan oleh kinerja pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan Pemilu Presiden. Masyarakat Kota Jambi lebih merasakan kinerja pemerintah daerah dibandingkan dengan kinerja pemerintah pusat sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan hak politik pada Pemilu Presiden Tahun 2019, sebagaimana hasil penelitian Sundari (2017), menjelaskan bahwa kurang percayanya masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah menyebabkan rendahnya partisipasinya dalam pemilihan Bupati Pelalawan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2015. Dengan adanya Pemilu, pemerintah menerima mandat demokratis dan bertanggung jawab atas tindakan mereka (Sartika, 2017). Kinerja pemerintah yang dinilai oleh masyarakat baik akan meningkatkan kepercayaan kepada Presiden untuk dipilih kembali pada periode kepemimpinan selanjutnya. Pelaksanaan Pemilu diharapkan menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kinerjanya, karena jika tidak akan menghilangkan dukungan publik dari pemerintah dan merusak keberlanjutan pembangunan demokrasi (Bhakti & Gunawan, 2020).

Peningkatan partisipasi politik akan meningkatkan kesadaran melaksanakan kewajiban sebagai warga negara serta berperan aktif dalam kehidupan demokrasi. Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi menguatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian Pemilu Presiden langsung menjadi langkah awal penguatan partisipasi atau penguatan peran serta masyarakat (Zuhro, 2019).

Pengaruh Sosialisasi terhadap Probabilitas Pelaksanaan Hak Politik Masyarakat Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019

Sosialisasi politik merupakan kegiatan dalam

menyebarkan suatu informasi dan pengetahuan politik, proses yang berlangsung lama melalui proses pengajaran, pembinaan, pengumuman maupun doktrinasi dengan tujuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang sehingga dapat menghasilkan sesuatu seperti yang dikehendaki, serta dapat memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Dengan adanya sosialisasi politik, masyarakat menjadi paham tentang politik sehingga membentuk kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi.

Hasil analisis menjelaskan bahwa sosialisasi politik di Kota Jambi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas pelaksanaan hak politik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Hasil ini menjelaskan bahwa sosialisasi Pemilu Presiden pada Tahun 2019 di Kota Jambi kurang berperan efektif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak politiknya. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Abdullah (2016) menyebutkan bahwa sosialisasi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Sosialisasi politik hanya berpengaruh positif melalui media massa. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarif (2016) yang menyebutkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara sosialisasi politik dengan partisipasi politik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa apabila proses sosialisasi politik semakin baik maka partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin meningkat. Hasil penelitian Hendrik (2010) juga mengungkap hal sama, bahwa apabila sosialisasi politik rendah menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan kurang efektifnya peran keluarga dan lembaga-lembaga politik dalam mensosialisasikan politik kepada masyarakat sehingga mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan politik. Sebagaimana diungkapkan oleh Nurrahmi (2017) dalam penelitiannya bahwa adanya diskusi politik dalam keluarga dan kelompok-kelompok di masyarakat akan meningkatkan keterlibatan individu dalam politik. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif KPU dalam meningkatkan sosialisasi politik kepada masyarakat melalui berbagai media. Sebagaimana diungkapkan oleh Prasetyo (2018) dalam penelitiannya, bahwa semakin efektif peran KPU dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat akan semakin meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan hak politiknya, karena melalui sosialisasi politik informasi Pemilu, seperti identitas calon, cara memilih dan peran masyarakat dalam Pemilu dapat diketahui dengan baik. Wibowo et al. (2019) dalam penelitiannya mengungkap strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan

secara ofensif dan defensif, namun strategi ofensif dinilai lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pengaruh Budaya Politik terhadap Probabilitas Pelaksanaan Hak politik Masyarakat Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019

Budaya politik menggambarkan persepsi manusia dan sikapnya terhadap berbagai masalah politik serta peristiwa politik yang berhubungan dengan pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan yang akan berubah seiring perubahan kondisi dan zaman. Budaya politik yang berkembang di tengah masyarakat ditentukan oleh tingkat partisipasinya terhadap pelaksanaan demokrasi. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah menunjukkan budaya politik yang parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana. Mulyawan (2015), menyatakan bahwa budaya parokial pemilih ditandai dengan semangat primordialisme secara berlebihan seperti menguatnya rasa kedaerahan yang jelas membawa kerugian pada sistem politik dan cenderung menimbulkan konflik yang pada akhirnya jadi faktor penghambat konsolidasi demokrasi. Hasil penelitian Sucipto (2015) mengungkapkan bahwa masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan masih bersifat labil, sedangkan yang berbudaya politik parokial sulit dipengaruhi.

Pada masyarakat yang relatif maju (baik secara sosial maupun secara ekonomi), biasanya bersifat subjektif dalam berpolitik dan tidak bersifat pasif. Winarno (2007) mengubah budaya politik suatu masyarakat (bangsa) membutuhkan waktu yang panjang apalagi budaya tersebut sudah berurat berakar dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam berpolitik akan memiliki sikap partisipatif yang tinggi dalam berpolitik, yaitu mampu memberikan opini dan aktif dalam kegiatan politik atau yang dikenal dengan budaya politik partisipan.

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan Budaya Politik masyarakat Kota Jambi terhadap probabilitas Pelaksanaan Hak Politik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Masyarakat Kota pada umumnya bersifat objektif dalam berpolitik karena didukung dengan kondisi sosial dan ekonomi yang baik, sehingga memiliki kesadaran yang tinggi dalam berpolitik. Sebagaimana diperkuat oleh Egeten (2015) dalam penelitiannya, bahwa bentuk budaya politik masyarakat sangat menentukan keterlibatan rakyat dalam pembangunan politik.

Hasil penelitian Kesuma (2016) juga menegaskan bahwa pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik mempengaruhi tingkat aspirasi politik. Pembelajaran budaya politik di sekolah

mampu membangun sikap kesadaran berpartisipasi siswa dalam pelaksanaan hak politik di tingkat pemula. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Alamsyah (2010), bahwa untuk proses sosialisasi politik akan sangat menentukan budaya politik dan demokratisasi di suatu negara.

Pengaruh Sikap Politik terhadap Probabilitas Pelaksanaan Hak politik Masyarakat Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019

Sikap politik menunjukkan perilaku masyarakat yang mencerminkan problema, respon-respon emosional, dalam dukungannya kepada pemerintah, respon terhadap perundangan dan kebijakan yang terkait dengan kepentingan rakyat (Suryandari et al, 2013). Apabila masyarakat memiliki sikap politik yang baik, maka akan ada kecenderungan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap politik masyarakat yang baik akan terlihat pada tingkat kognitif (seluruh pengetahuan mengenai politik), afeksi (perasaan), dan konasi (harapan). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat sikap politik masyarakat Kota Jambi. Dari 266 responden yang diteliti, sebagian besar (55,64%) menunjukkan sikap politik yang sangat baik. Namun sebagian kecilnya (33,58%) menunjukkan sikap politik yang buruk. Kondisi inilah yang menyebabkan tingkat probabilitas masyarakat Kota Jambi dalam melaksanakan hak politiknya pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Sebagaimana dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan Sikap Politik masyarakat Kota Jambi terhadap probabilitas Pelaksanaan Hak Politik pada Pemilu Presiden Tahun 2019.

Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya responsibilitas masyarakat Kota Jambi terhadap terwujudnya pemerintah yang demokratis melalui terpilihnya kepala Negara berdasarkan pilihannya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Milo & Sitorus (2019), sikap politik merupakan sikap internal yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk reaksi opini terhadap objek situasi politik sebagai akibat dari pengakuan masyarakat yang meliputi beberapa aspek dari objek atau situasi politik tergantung pada masalah pemimpin institusi ide dan peristiwa politik. Hasil kajian yang dilakukan oleh Yustiningrum dan Ichwanuddin (2015), menjelaskan bahwa secara psikologis sikap pemilih sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga dan peran media massa. Disamping itu, identitas kepartaian seseorang menentukan loyalitas terhadap partai/kandidat sehingga mengakibatkan mudah beralih pada partai/kandidat lain. Kondisi perekonomian pemilih menjadi isu yang sangat strategis untuk membangun kedekatan dengan partai/kandidat

dalam mendapatkan dukungan. Dalam kajian yang lebih spesifik, Pradhanawati (2010) mengungkapkan bahwa pada Pemilu Presiden Tahun 2009 sikap sosial politik mahasiswa dalam Pemilu Presiden sangat ditentukan oleh kepribadian kandidat. Sementara studi yang dilakukan oleh Hanani et al, (2019) menyebutkan bahwa sikap politik masyarakat di Kabupaten Bangkalan dalam pilpres 2019 dipengaruhi oleh pendapat tokoh agama.

Pengaruh Status Ekonomi terhadap Probabilitas Pelaksanaan Hak politik Masyarakat Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019

Status ekonomi masyarakat menggambarkan kondisi perekonomian keluarga yang dilihat dari bentuk pekerjaan dan tingkat pendapatan. Masyarakat yang perekonomiannya lebih maju akan lebih aktif dalam pelaksanaan hak politik.

Hasil analisis menjelaskan bahwa Status Ekonomi masyarakat Kota Jambi berdasarkan Tingkat Pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pelaksanaan hak Politik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Hasil ini menjelaskan bahwa, masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan semakin tinggi tingkat probabilitasnya untuk melaksanakan hak politiknya pada Pemilu Presiden dibandingkan dengan masyarakat yang Golput. Hasil ini didukung oleh penelitian Arwiyah (2012) mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik Pilkada ditentukan oleh status ekonomi. Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi lebih berpotensi untuk melaksanakan hak politiknya pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Masyarakat yang berpendapatan rendah akan lebih cenderung lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari pada kehidupan politik. Ini diperkuat dari hasil penelitian Wulandari (2013) yang menunjukan adanya hubungan yang kuat antara status ekonomi masyarakat dengan partisipasi politik pada pilkada di Semarang pada tahun 2010. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2016) juga mengungkap hasil yang sama, bahwa status sosial ekonomi masyarakat sangat menentukan tingkat partisipasi dalam Pemilu Presiden.

Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa status ekonomi masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas masyarakat dalam melaksanakan hak politik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Dalam penelitian ini jenis pekerjaan masyarakat diklasifikasikan kedalam kategori Kerah Putih (Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis; Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; tenaga tata usaha dan yang sejenis), Kerah Abu-abu (Tenaga usaha penjualan; Tenaga usaha jasa),

Kerah Biru (Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan; Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar) dan tidak bekerja (Pelajar/Mahasiswa/ Pengangguran). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa apapun jenis pekerjaan masyarakat mereka tetap berusaha untuk mewujudkan hak politiknya dalam Pemilu Presiden Tahun 2019. Hasil ini tidak berbanding lurus dengan status ekonomi masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan yang berpengaruh signifikan terhadap probabilitas masyarakat dalam melaksanakan hak politik. Kondisi ini terungkap dari hasil penelitian terhadap 266 responden yang menjelaskan bahwa tidak semua responden yang memiliki status pekerjaan tinggi menghasilkan pendapatan yang tinggi. Status pekerjaan masyarakat Kota Jambi yang bekerja di sektor perdagangan memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di sektor perkantoran.

SIMPULAN

Pelaksanaan hak politik sangat menentukan terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat dalam politik tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan hak politik pada Pemilu Presiden saja, namun dukungan secara aktif dalam pembangunan sangat menentukan kehidupan berdemokrasi di suatu Negara. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam artikel ini mengungkapkan bahwa tingkat probabilitas pelaksanaan hak politik masyarakat di Kota Jambi sangat dipengaruhi oleh pendidikan politik, budaya politik, sikap politik dan tingkat pendapatan masyarakat. Pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat probabilitas pelaksanaan hak politik pada Pemilu Presiden. Masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih cenderung untuk melaksanakan hak politiknya dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Masyarakat Kota Jambi menunjukan budaya politik partisipan sehingga kecenderungan dalam melaksanakan hak politik sangat tinggi. Sikap politik masyarakat Kota Jambi menunjukan respon yang positif terhadap pemerintah, perundangan dan kebijakan berkaitan dengan kepentingan masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi dalam pelaksanaan hak politik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Pendapatan bagi masyarakat Kota Jambi menjadi alasan yang kuat terhadap pelaksanaan hak politik. Masyarakat dengan pendapatan yang tinggi memiliki kecenderungan untuk melaksanakan hak politiknya dalam Pemilu Presiden dibandingkan dengan yang berpenghasilan rendah. Namun dari segi pekerjaan, masyarakat Kota Jambi tidak terpengaruh dalam melaksanakan hak politiknya.

Hasil penelitian ini menekankan kepada pemerintah dan pelaku politik untuk mengoptimalkan sosialisasi politik dan pelaksanaan program pembangunan yang telah dijadikan visi dan misi pada saat kampanye, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari pelaksanaan hak politiknya dan menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Perlu dibangun budaya politik yang partisipatif melalui ketaudalan para pemimpin, birokrasi dan para politikus partai di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbaikan perekonomian masyarakat menjadi prioritas utama agar tidak menghambat pelaksanaan hak politik dan tidak menjadi peluang bagi praktek *money politic*. Untuk melengkapi hasil penelitian ini, perlu dilakukan penelitian terhadap optimalisasi pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan hak politik masyarakat pada Pemilu untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- [KPU].2020. *Komisi Pemilihan Umum republic Indonesia*. <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>. diakses pada tanggal 7 September 2020.
- Abdullah, N. (2016). Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Sosialisasi Politik Melalui Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 4(4), 1627-1638
- Alamsyah, M, N. (2010). Budaya Politik dan Iklim Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 2(2). 413-425.
- Arwiyah, M, Y. (2012). Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *MIMBAR*. 28(1), 85-92.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287-310.
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Jurnal Warta*, 13(3), 43-56.
- Bhakti, I, S, G, & Gunawan, T, A. (2020). Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagent, Magelang. *Jurnal Suara Hukum*. 2(1), 21-32. DOI: 10.26740/jsh.v2n1.p21-32
- Budianto, R. (2017). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 5(1), 93-106.
- Egeten, M. (2015). Implementasi Budaya Politik Serta Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Politik. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(28).
- Handoyo, E. & Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya
- Hendrik, D. (2010). Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *DEMOKRASI*. 9(2), 137-148.
- Hidayat, T. (2016). Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 4(4), 562-576.
- Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia. Suatu Model Pengantar. Edisi Revisi*. Bandung: Sinar baru Algensindo.
- Milo, Y & Sitorus, F E. M. (2019). Sikap Politik Fraksi Partai Demokrat Mengenai Isu Ambang Batas Presidensial Dalam Rancangan Undang-undang Tentang Pemilihan Umum Pada Tahun 2017. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta*. 4(2)
- Mulyaman, B. (2015). Budaya Politik Masyarakat Indonesia Dalam Perpektif Pembangunan Politik. *Jurnal Aspirasi*. 5 (2) 1-8
- Nasuha, C, N., & Cholik, C, A. (2019). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada (Studi Pada Pilkada Bupati Di Kabupaten Kuningan). *Syntax Idea*. 1(8), 50-66.
- Nugraha, F. (2017). Persepsi Tokoh Politik terhadap Model Pemilukada Gubernur. *Jurnal Civics*. 14(1), 119-127.
- Nurdiansyah, N. (2015). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 54-58.
- Nurrahmi, F. (2017). Pengaruh Terpaan Media dan Sosialisasi Politik melalui Primary Groups terhadap proses Pengambilan Keputusan Pemilihan. *Jurnal Komunikasi Global*. 6(1), 39-55.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. 5(1), 51-59.

- Pradhanawati, A. (2010). Perilaku dan Sikap Sosial-Politik Mahasiswa dalam Pilpres 2009. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik [MKP]*, 23(3), 181-186.
- Prasetyo, M, I, W. & Adnan, M, F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*. 2(3), 157-163.
- Sahid, K. (2015). *Memahami Sosiologi Politik*. Jakarta, Ghalia Indonesia. 161
- Sartika, P. (2017). Partisipasi Pemilih Etnis Tionghoa Di Kelurahan Tawang Mas Dalam Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studie*. 6(2), 161-170.
- Stoltzfus, J, C. (2011). Logistic Regression: A Brief Primer. *Academic Emergency Medicine*. 18(10), 1099-1104
- Subanda, N. (2009). Analisis Kritis Terhadap Fenomena Abstain dalam Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. 2(1), 60-72.
- Sucipto, A. (2015). Budaya Politik Lokal dan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. *Jurnal ilmu sosial MAHAKAM*, 4(1), 31-44.
- Sundari, F, W. (2015). Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pelalawan Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2015. *JOM FISIP*. 4(1), 1-15.
- Surbakti, R. 2103. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Suryandari, N., Rahmawati, F, N. & Kurniasari, N, D (2013). Perubahan Pengetahuan Dan Sikap Politik Masyarakat Berbasis nformation And Social Approach (Strategi Komunikasi Politik dalam eminimalisasi Absentia Voters di Sampang Madura). *Pamator*. 6(1), 95-102.
- Syarif, M,A. (2016). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Walikota 2015 di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 4(4), 547-561.
- Taherdoost, H. (2016). Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for Research. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*. 5(2), 18-27.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia.
- Wibowo, E,A., Muradi, & Sudirman, A. (2019). Strategi Sosialisasi Politik dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pilkada Serentak di Kota Magelang. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 22-44.
- Widhiasthini, N,W., Subawa, N,S., Sedana, N., & Permatasari, N,P,I. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1), 1-11.
- Winarno. (2007). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: MedPress.
- Wulandari, H, S., Retno, N. & Purwoko. (2013). Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Etnis Keturunan Tionghoa dalam Pilwakot Semarang 2010. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2(3), 36-45.
- Yustiningrum, R,E., & Ichwanuddin, W. (2015). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 117-135.
- Zuhro, S,R. (2019). Demokrasi dan Pemilihan Umum Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 16(1) 69-81.